



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERIODE TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Tarisya Rizki Putri Kuseriyanto

022118130

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2022



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERIODE
TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR
(PERIODE TAHUN 2015-2020)**

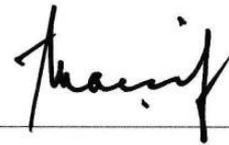
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022

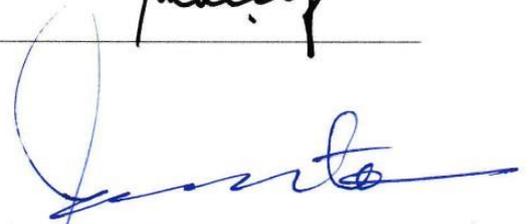
Tarisya Rizki Putri Kusheriyanto
0221 18 130

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFA.)



Ketua Komisi Pembimbing
Dr. Edy Sudaryanto, Ak., MM.)



Anggota Komisi Pembimbing
Sujatmiko Wibowo, ST., M.Ak



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarisya Rizki Putri Kusheriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 022118130
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bogor Periode Tahun 2015-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 10 Juni 2022

Tarisya Rizki P:



BCC76AKX084299732

0221 18 130

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun
2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

TARISYA RIZKI PUTRI KUSHERIYANTO. 022118130. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bogor Periode Tahun 2015-2020. Di bawah bimbingan: EDY SUDARYANTO dan SUJATMIKO WIBOWO. 2022.

Dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Jenis-jenis pengeluaran daerah terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal serta untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota mengelola Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Penelitian dilakukan dengan mengambil data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 di Badan Keuangan dan Aset Kota Bogor. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel, metode statistik uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi, uji hipotesis yaitu uji regresi linear sederhana, uji determinasi, dan uji t, lalu menghitung rasio efektivitas menggunakan Microsoft Excel.

Berdasarkan uji statistik dengan uji t mendapatkan hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh tidak meningkatkan alokasi Belanja Modal di Kota Bogor. Analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020 dapat dikategorikan efektif. Berdasarkan analisis rasio efektivitas Belanja Modal menunjukkan Kinerja pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan dan mengelola Belanja Modal pada tahun 2015, 2016, dan 2019 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2017, 2018, dan 2020 dapat dikategorikan efektif.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Saya dapat mengajukan skripsi ini. Adapun judul dari Skripsi ini adalah "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bogor Periode Tahun 2015-2020". Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Starta 1 (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Pakuan.

Selama melakukan skripsi ini, Penulis tidak luput dari masalah. Namun hal ini dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunianya untuk Penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Kepada keluarga saya tercinta, Ayah penulis Yudi Kuseriyanto, Ibu penulis Sofie Linawati, dan Adik penulis Aditya Diandra Putra Kuseriyanto.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor.
4. Kepada Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Kepada Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CFE., CFA., CA. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Kepada Bapak Dr. Edy Sudaryanto, Ak., MM. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, saran, dan dukungan agar penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik.
8. Kepada Bapak Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, petunjuk, dan dukungan agar penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik.
9. Kepada Ibu May Mulyaningsih, S.E.,M.Ak.,CFA. selaku dosen wali yang membantu dan memberikan bimbingan selama masa studi.
10. Kepada para Dosen dan Staff Pengajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan atas ilmu yang diberikan kepada Penulis.
11. Kepada Bapak Achmad Suwandi, S.E Selaku Kasubid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang membantu dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

12. Kepada para sahabat seperjuangan Saya yaitu, Ega Permatasari, Muhammad Agil, Muthia Risiqilah, Anna Meitasari, Melenia Tarigan, Aqso Muhammad Kandiaz, dan Alfa Dino Iskandar yang telah menemani dan memberikan semangat kepada Penulis selama masa perkuliahan.
13. Kepada para sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yaitu, Ira Rosalinda, Devana Satya, Elni Novitasari, Delviani Permatasari, Andri, Aliffia Hanin Nugraha, Westri Nur Utami, Tyas Eriyanthi, dan Muhammad Danu Rangga.
14. Kepada teman-teman Kelas E angkatan 2018 yang telah bersama-sama menempuh studi di Universitas Pakuan.

Akhir kata Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu Saya dalam menyusun penelitian ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menantikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Bogor, Januari 2022

Penyusun



Tarisya Rizki Putri

Kusheriyanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HAK CIPTA	iii
LEMBAR HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Maksud Penelitian	10
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Akademis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Akuntansi Sektor Publik	13
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan	13
2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan.....	14
2.1.3 Standar Akuntansi Sektor Pemerintahan	14
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.2.2 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.2.3 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	23
2.2.4 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	24

2.3 Belanja Modal.....	25
2.3.1 Klasifikasi Belanja Modal	26
2.3.2 Penganggaran Belanja Modal	27
2.3.3 Manfaat Belanja Modal	27
2.3.4 Kebijakan Belanja Modal	27
2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian.....	29
2.4.1 Penelitian Terdahulu.....	29
2.4.2 Kerangka Penelitian.....	47
2.5 Hipotesis Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	49
3.3 Jenis dan Sumber Penelitian	49
3.4 Operasionalisasi Variabel	50
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data	51
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	52
3.6.3 Uji Hipotesis (Uji t)	53
3.6.4 Regresi Linear Sederhana	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Hasil Pengumpulan Data.....	56
4.2 Analisis Deskriptif	58
4.2.1 Menghitung Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	58
4.2.2 Menghitung Rasio Efektivitas Belanja Modal.....	58
4.3 Analisis Variabel.....	59
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	59
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi	63
4.3.3 Uji Hipotesis (Uji-t).....	65
4.3.4 Analisis Regresi Linear Sederhana	66
4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	66
4.3.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	67
4.3.2 Efektivitas Belanja Modal	67
4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	71
5.2.1 Saran bagi Pemerintah Daerah.....	71
5.2.2 Saran Bagi Masyarakat	72
5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Daftar Provinsi Kategori Mandiri di Indonesia Tahun 2020	2
Tabel 1. 2	Tabel Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah	2
Tabel 1. 3	Daftar Kota Menuju Mandiri di Jawa Barat Tahun 2020	3
Tabel 1. 4	Tabel Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020	6
Tabel 1. 5	Tabel Realisasi Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020	8
Tabel 2. 1	Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	24
Tabel 2. 2	Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	25
Tabel 2. 3	Tabel Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2. 4	Matriks Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3. 1	Operasionalisasi Variabel	50
Tabel 4. 1	Data PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	57
Tabel 4. 2	Data Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020	57
Tabel 4. 3	Tabel Rasio Efektivitas PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020	58
Tabel 4. 4	Tabel Rasio Efektivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020	58
Tabel 4. 5	Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4. 6	Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4. 7	Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4. 8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
Tabel 4. 9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Lanjutan	64
Tabel 4. 10	Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	65
Tabel 4. 11	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	66
Tabel 4. 12	Hasil Hipotesis Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	5
Gambar 1. 2 Diagram Tingkat Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	7
Gambar 2. 1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	24
Gambar 2. 2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	25
Gambar 2. 3 Konstelasi Penelitian.....	48
Gambar 3. 1 Rumus Koefisien Determinasi	53
Gambar 3. 2 Rumus Analisis Regresi Sederhana.....	54
Gambar 3. 3 Rumus Koefisien Regresi.....	54
Gambar 3. 4 Rumus Konstanta Intersep	55
Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	57
Gambar 4. 2 Scatterplot	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1	Surat Izin Meminta Data	78
Lampiran. 2	Surat Izin dari Kesbanpol	80
Lampiran. 3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015	81
Lampiran. 4	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016	81
Lampiran. 5	Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2017.....	82
Lampiran. 6	Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2018.....	83
Lampiran. 7	Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2019.....	83
Lampiran. 8	Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2020.....	83
Lampiran. 9	Hasil Olah Data SPSS	84
Lampiran. 10	Hasil Uji SPSS Lanjutan	88
Lampiran. 11	Hasil Uji PAD Terhadap Belanja Operasi.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia diterpa musibah Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar bagi dunia, tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian dunia. Indonesia dihadapkan oleh banyak masalah khususnya terkait aspek ekonomi. Perekonomian di Indonesia tumbuh negatif, angka pengangguran tinggi, dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2020) perhitungan *Year on Year* pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan mencapai 2,97% dibandingkan pada triwulan pertama tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Pemberlakuan PSBB ini berdampak signifikan terhadap kegiatan yang mengganggu kinerja perekonomian Indonesia. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun akibat pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya dan bahkan beberapa sektor usaha terpaksa tutup total. Dengan ketidakstabilan perekonomian pada setiap masing-masing daerah di Indonesia, pemerintah mencoba membuat berbagai macam kebijakan untuk membantu memulihkan perekonomian. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak pada setiap individu, organisasi tertentu, dan bahkan investor asing yang bersedia mendukung pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan tentang sumber-sumber yang dipungut dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-undang tersebut, peranan pajak daerah adalah salah satu faktor yang sangat potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada setiap daerah di Indonesia, maka dari itu pemberian insentif pajak di tengah pandemi dapat berdampak sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kontribusi PAD dijadikan tolak ukur untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dan desentralisasi fiskal.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan dari Desentralisasi. Desentralisasi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri yang berorientasi pada kepentingan publik yang diukur menggunakan indeks kemandirian fiskal. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, pengesahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Dengan demikian, setiap daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai macam kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Menurut data yang didapatkan dari Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018-2019 menyebutkan bahwa di Indonesia tidak terdapat provinsi yang masuk dalam kategori sangat mandiri. Hanya sebagian besar di pulau Jawa dan Bali yang telah mandiri, sedangkan untuk di luar provinsi Jawa dan Bali hanya ada provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berikut ini adalah urutan provinsi yang masuk ke dalam kategori Mandiri berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal tahun 2020, yaitu:

Tabel 1. 1

Daftar Provinsi Kategori Mandiri di Indonesia Tahun 2020

Provinsi	IKF
DKI Jakarta	0,6365
Jawa Timur	0,5671
Bali	0,5367
Jawa Tengah	0,5383
Banten	0,5290
Kalimantan Barat	0,5220
Jawa Barat	0,5140

Sumber: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Tabel 1. 2

Tabel Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq \text{IKF} \leq 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq \text{IKF} \leq 0,5$	Menuju Mandiri
$0,50 \leq \text{IKF} \leq 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi mandiri dengan IKF terendah dibandingkan provinsi mandiri lainnya. Apabila dilihat dari jumlah populasi pada tahun 2020, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara provinsi mandiri lainnya. Sedangkan salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal daerah. Dengan kemandirian fiskal, daerah akan mampu membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih terbaik untuk masyarakatnya. Dalam provinsi Jawa Barat sendiri, tidak ada kota maupun kabupaten yang masuk ke dalam kategori “Mandiri”. Indeks Kemandirian Fiskal kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat hanya masuk ke dalam kategori “Menuju Kemandirian” dan sisanya masuk ke dalam kategori “Belum Mandiri”. Berikut ini adalah daftar kota yang masuk ke dalam kategori Menuju Kemandirian di Jawa Barat tahun 2020:

Tabel 1. 3

Daftar Kota Menuju Mandiri di Jawa Barat Tahun 2020

Kota	IKF
Kota Bekasi	0,4024
Kota Depok	0,3971
Kota Bandung	0,3656
Kota Bogor	0,3544
Kota Sukabumi	0,2880
Kota Cirebon	0,2676
Kota Cimahi	0,2562

Sumber: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

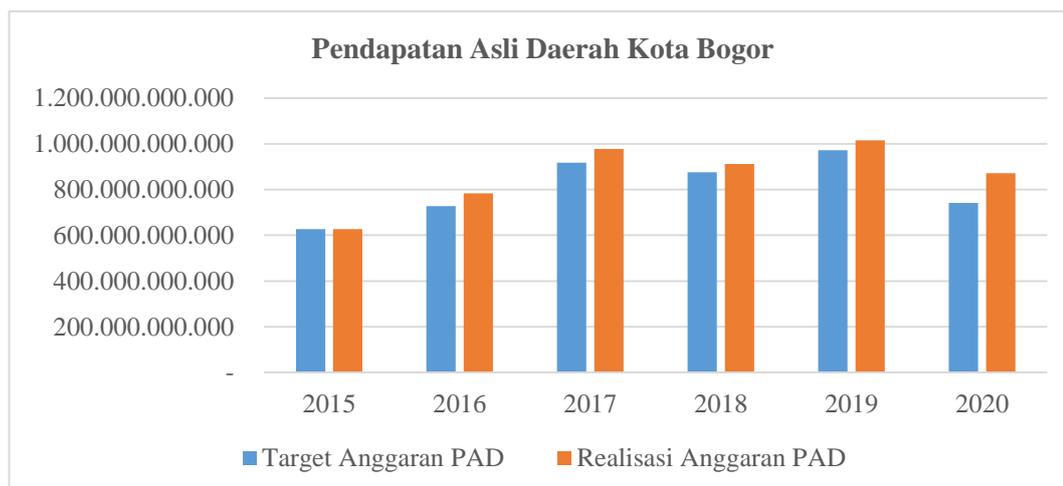
Berdasarkan data di atas, hanya 7 kota di Jawa Barat yang berhasil memenuhi kategori kota “Menuju Mandiri”. Kota-kota tersebut merupakan kota-kota besar yang ada di daerah Jawa Barat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Antara News.com (2021) kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Bambang Juanda memaparkan beberapa penyebab rendahnya Indeks Kemandirian Fiskal suatu daerah berdasarkan studi di beberapa daerah, menyebutkan bahwa faktor tersebut disebabkan karena belum mampunya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan hasil kekayaan yang dipisahkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan. Dengan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan pemerintah daerah serta tingginya tingkat pengeluaran daerah di tengah pandemi *Covid-19*, mengharuskan Pemerintah Daerah membelanjakan keuangan daerahnya dengan efektif dan efisien. Sedangkan dalam bentuk mewujudkan desentralisasi fiskal, belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja daerah yang paling produktif dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana kepentingan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal gedung, belanja modal peralatan, belanja modal mesin, dan lain-lain. Kini Pemerintah Daerah harus selektif memilih Belanja Daerah mana efektif dalam memulihkan perekonomian daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat penyebaran *Covid-19* nya tinggi adalah Kota Bogor. Sebagai langkah penanganannya, Pemerintah Kota Bogor melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam waktu yang lama. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingginya pengeluaran pemerintah Kota Bogor saat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdampak pada tingkat pendapatan Kota Bogor yang menurun di tahun 2020.

Menurut artikel yang dilansir oleh Soemadi Henaldi di Tribun News.com (2019), menjelaskan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan Kota Bogor pada tahun 2018 sebesar Rp 912 miliar atau mencapai 102,47% dari target yang ditetapkan. Pendapatan pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap tingginya tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor sebesar Rp 593 miliar. Sedangkan pada tahun berikutnya, PAD Kota Bogor diproyeksi meningkat menjadi Rp 972 miliar. Peningkatan ini mayoritas dipengaruhi oleh kenaikan proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan Kota Bogor pada tahun 2019 mencapai Rp 1 triliun. Angka ini meningkat dari realisasi PAD Kota Bogor pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Isu Bogor.com pada bulan Maret Tahun 2021 kepada sekertaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi menyatakan bahwa pada tahun 2020 Kota Bogor menetapkan target anggaran untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1 triliun. Pemerintah Kota Bogor mengharapkan realisasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun nyatanya pada pertengahan tahun 2020, pemerintah Kota Bogor melakukan *Refocusing* anggaran dan Realokasi APBD dalam upaya memerangi pandemi *Covid-19*. Dalam hal ini, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait hal ini, komponen anggaran Pendapatan Asli Daerah yang semula mencapai Rp 1 triliun berkurang menjadi Rp 741 miliar dengan realisasi pendapatan Kota Bogor sebesar Rp 872 miliar.

Berikut adalah diagram yang menunjukkan posisi target capaian anggaran dan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dari tahun 2015-2020:



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Gambar 1. 1 Diagram Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020

Dapat dilihat dari diagram di atas, selama enam tahun berturut-turut terjadi penurunan dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak konsisten. Setelah mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2015-2017, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan di tahun 2018. Lalu, Pendapatan Asli Daerah naik di tahun 2019 namun mengalami penurunan lagi di tahun 2020. Salah satu penyebab menurunnya PAD ini disebabkan oleh Retribusi Daerah yang dihasilkan Kota Bogor.

Berikut ini adalah uraian data rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor dari tahun 2015-2020:

Tabel 1. 4

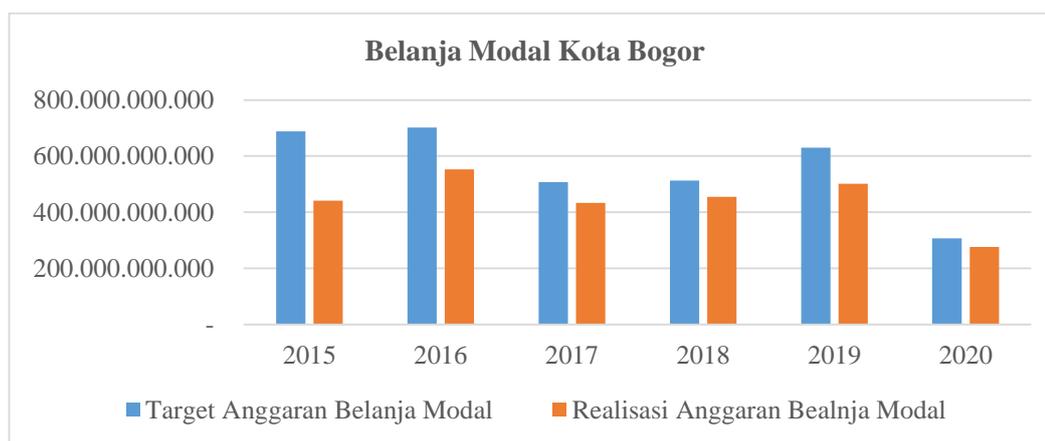
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	Angka Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor					
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pendapatan Pajak Daerah	398.435.398.328	492.138.653.391	555.475.409.588	592.978.746.861	689.543.006.040	509.039.468.746
Hasil Retribusi Daerah	46.219.894.849	62.727.631.456	49.043.299.929	48.418.070.315	51.362.153.192	35.010.375.259
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	28.807.894.849	33.107.211.225	29.949.487.128	26.772.427.406	28.241.844.911	31.927.293.792
Lain-lain PAD yang Sah	154.134.016.696	195.900.091.147	343.739.545.302	244.028.726.706	246.737.212.777	296.040.104.355
Total	627.597.050.141	783.873.587.219	978.197.741.941	912.197.971.287	1.015.884.216.920	872.017.242.152

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai Rp 1 triliun, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari Pendapatan Pajak Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2015 yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kota Bogor pada Tahun 2020 menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah yang rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2020, *Refocusing* anggaran terjadi tidak hanya pada Pendapatan Asli Daerah saja, namun terjadi pada anggaran Belanja Daerah yang menurun dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Salah satu Belanja Daerah yang terkena *Refocusing* dan Realokasi adalah Belanja Modal.

Berikut adalah diagram yang menunjukkan posisi target capaian anggaran dan realisasi belanja modal di Kota Bogor selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2015-2020:



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Gambar 1. 2 Diagram Tingkat Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020

Dapat dilihat dari diagram di atas, target capaian dan realisasi Belanja Modal tertinggi berada di tahun 2016, sedangkan target capaian dan realisasi Belanja Modal terendah berada pada tahun 2020. Penyerapan anggaran belanja modal yang paling efektif terjadi pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara realisasi dan target capaian anggaran yang ditetapkan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan uraian realisasi anggaran untuk belanja modal di Kota Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 1. 5

Realisasi Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Bogor	Angka Realisasi Anggaran Belanja Modal					
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Tanah	8.347.295.355	9.338.193.940	1.426.177.314	9.314.649.200	18.044.020.000	2.772.007.406
Belanja Peralatan dan Mesin	88.426.943.379	101.623.727.575	100.771.500.035	101.665.269.154	99.754.707.327	129.790.481.108
Belanja Bangunan dan Gedung	95.466.281.082	156.173.673.849	145.187.264.010	66.483.846.768	144.703.165.317	30.694.955.339
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	247.091.808.411	285.046.941.672	185.381.517.846	276.223.614.766	235.965.307.071	109.784.631.171
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.587.223.000	301.980.000	725.257.519	1.774.343.705	1.910.823.018	1.789.184.630
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	655.385.000	1.325.953.357
Total	440.919.551.227	552.484.517.036	433.491.716.724	455.461.723.593	501.033.407.778	276.157.283.029

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dapat dilihat dari tabel 1.5 di atas, pada tahun 2020 realisasi Belanja Modal Kota Bogor hanya sebesar Rp 276 miliar dari target yang ditetapkan yaitu Rp 307 miliar. Angka ini menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada pertengahan tahun 2020 terjadi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran untuk penanganan dan pemulihan perekonomian di tengah pandemi. Walaupun terjadi pemotongan Anggaran pada pertengahan tahun, Pemerintah Kota Bogor berhasil menyerap Belanja modal dengan sangat produktif. Berbeda dengan tahun 2015, belanja modal yang ditargetkan Kota Bogor sebesar Rp 688 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 440 miliar. Realisasi ini sangat jauh dari target yang ditetapkan, serta realisasi untuk belanja bangunan dan gedung terbilang rendah. Artinya, Pemerintah Kota Bogor tidak memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini akan berdampak pada kurangnya sarana dan prasarana umum untuk masyarakat.

Pada tahun 2016, Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 701 miliar dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 552 miliar. Tentunya angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya, padahal Realisasi Belanja Modal sangat jauh dibawah Target Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor. Hal ini menandakan Pemerintah Kota Bogor belum memaksimalkan penggunaan Belanja Modalnya. Setelah penggunaan Anggaran Belanja Modal yang tidak maksimal pada tahun sebelumnya, di tahun 2017 Pemerintah Kota Bogor menurunkan anggarannya sebesar Rp 507 miliar. Namun, angka realisasinya masih jauh lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya Realisasi Belanja Modal menyebabkan menurunnya Anggaran Belanja Modal tahun berikutnya. Pada tahun 2018, anggaran untuk Belanja Modal menjadi Rp 512 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 455 miliar. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor menaikkan Anggaran Belanja Modal cukup besar menjadi Rp 630 miliar. Pemerintah Kota Bogor mengharapkan hal ini akan berdampak pada realisasi Belanja Modal yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Sebagai fokus penelitian, penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitri. S (2020), Yani Rizal & Erpita (2020), Dedi Suprianto (2016), dan Isti Permatasari (2019) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani & Eka Pariani (2018) dengan judul yang sama, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten serta untuk meneliti apakah Pemerintah Kota Bogor telah memanfaatkan belanja modalnya semaksimal mungkin, hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk masyarakat serta banyaknya infrastruktur milik Pemerintah Kota Bogor yang terbengkalai begitu saja khususnya di tengah pandemi. Maka dari itu Saya tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal yang berjudul “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bogor Periode Tahun 2015-2020”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh Pemerintah Kota Bogor.
2. Penyerapan Belanja Modal di Kota Bogor belum maksimal. Angka realisasi anggaran jauh di bawah target yang ditetapkan dalam APBD.
3. Dari data PAD dan Belanja Modal di Kota Bogor tahun 2015-2020, menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah PAD tidak selalu meningkatkan alokasi Belanja Modal.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bogor?
2. Bagaimana efektivitas Belanja Modal pada Kota Bogor?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bogor. Menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran agar mengurangi dari timbulnya masalah terhadap penelitian, dan memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat diterima dalam proses pembelajaran.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola Belanja Modal di Kota Bogor.
3. Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi peneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.
2. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Jamaludin Majid, (2019) menyebutkan, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (*American Accounting Association, 1966*). Organisasi yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat dilihat dari tujuannya, ada yang bertujuan untuk mencari laba dan organisasi yang bertujuan selain mencari laba. Akuntansi yang digunakan suatu organisasi untuk mencari laba disebut Akuntansi Sektor Bisnis (Sektor Privat), sedangkan organisasi yang bertujuan selain mencari laba disebut Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Salah satu organisasi sektor publik yang mudah dikenal adalah organisasi pemerintah. Pemerintah akan beraktivitas berdasarkan anggaran yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Jamaluddin Majid (2019) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh. Hal ini disebabkan karena karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Namun karena adanya tuntutan dari masyarakat, membuat akuntansi pemerintahan menjadi bagian penting sehingga ilmu akuntansi memasukan Akuntansi Pemerintahan sebagai bagiannya. Kebutuhan akuntansi pemerintah yang besar disebabkan oleh semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dilaksanakan sebagai wujud dari transparansi (Nuramalia Hasanah & Achmad Fauzi, 2017).

Menurut Nuramalia Hasanah & Achmad Fauzi (2017) menyatakan karakteristik akuntansi pemerintah sebagai berikut:

1. Akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba rugi
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
3. Akuntansi pemerintahan bisa menggunakan lebih dari satu jenis dana
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan

6. Dalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau peraturan perundang-undang. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas

Akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaataat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien dan efektif. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk membeikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya, serta untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.

- b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN atau APBD dan strategi pembangunan lainnya.

- c. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan Keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK.

2.1.3 Standar Akuntansi Sektor Pemerintahan

Praktik akuntansi harus dilaksanakan dengan mengacu pada Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). PABU membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten pada organisasi. PABU merupakan standar akuntansi yang harus diikuti di mana pun profesi akuntansi berbeda, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Namun, praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas-entitas tersebut memiliki banyak perbedaan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut, Federasi Akuntan Internasional (*International Federation of Accountants – IFAC*) membentuk komite khusus yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi publik yang berlaku secara internasional disebut "*Publik Sector Committee*". Dalam pelaksanaannya, komite tersebut menyusun standar yang disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik (*International Publik Sector Accounting Standards – IPSAS*) dan membuat program yang dapat mendorong penggunaan IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia.

Apabila dalam suatu Negara tidak terdapat arahan dan peraturan yang menuntut pelaporan keuangan organisasi sektor publik, baik yang dibuat oleh pemerintahnya maupun oleh badan pengatur atau organisasi profesi akuntan, maka IPSAS tidak dimaksudkan sebagai pengganti peraturan yang telah ditetapkan di negara yang bersangkutan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam laporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia, maka diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. Terdapat enam *Exposure Draft* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik – IAI yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan
2. Laporan arus kas
3. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi
4. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri
5. Kos pinjaman
6. Laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendali

Komite SAP bertugas untuk mempersiapkan penyusutan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, komite SAP bertugas untuk mengembangkan program-program akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut SAP disusun dengan berorientasi kepada IPSAS. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Dalam menyusun SAP, komite SAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh:

- a. *International Federation of Accountant.*
- b. *International Accounting Standards Committee*
- c. *International Monetary Fund*
- d. IAI
- e. *Financial Accounting Standards Board*
- f. *Governmental Accounting Standards Board*
- g. Perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.
- h. Organisasi professional lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Penerapan SAP di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Artinya, informasi keuangan

pemerintahan dapat dipercaya dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP terdiri dari kerangka konseptual dan 12 pernyataan, yaitu:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan.
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran.
3. PSAP 03: Laporan Aliran Kas.
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan.
5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan.
6. PSAP 06: Akuntansi Investasi.
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi.
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi.
12. PSAP 12: Laporan Operasional.

Sistem akuntansi badan-badan pemerintahan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 17 Tahun 2003 Pasal 23, UU No 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (3), dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Sedangkan unit-unit pemerintahan yang bergerak di bidang bisnis (BUMN/BUMD) harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sementara organisasi publik non pemerintahan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tuntutan mengenai pentingnya pengendalian atas berbagai kegiatan pemerintah semakin menguat. Hal ini karena berkurangnya percepatan pembangunan, terjadinya kesenjangan antar wilayah yang banyak merugikan masyarakat. Menurut Bastian (2009) peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi sektor publik adalah membantu manajer/pimpinan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang harus dipertimbangkan bersama-sama. Jones and Pendlebury (1996) membagikan proses perencanaan dan pengendalian pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar.
- b. Perencanaan operasional.
- c. Penganggaran.
- d. Pengendalian dan pengukuran.
- e. Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Perencanaan menjadi aspek yang memiliki peranan penting dalam suatu organisasi. Perencanaan yang strategis merupakan upaya dalam mengimplementasikan tujuan dan program-program organisasi yang telah ditetapkan dan akan menjadi acuan dalam menyusun anggaran. Anggaran dalam arti sempit merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun. Penganggaran (*Budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang

terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program, kegiatan, jumlah dana yang diperoleh dan dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen bahwa anggaran daerah merupakan wujud amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka mencapai kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2009:63) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan
2. Alat Pengendalian
3. Alat Kebijakan Fiskal
4. Alat Politik
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi
6. Alat Penilaian Kinerja
7. Alat Motivasi
8. Alat Menciptakan Ruang Publik

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal diharapkan Pemerintah Daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan dan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tingkat ketergantungan setiap daerah kepada Pemerintah Pusat. Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, seperti kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan daerahnya masing-masing. Namun, pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah harus lebih giat lagi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan factor yang paling menentukan dalam upaya meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan daerah ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Daerah menyiapkan dana untuk pembangunan yang telah direncanakan. Peranan Pemerintah Daerah dalam pembangunan yaitu, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Daerah yang tidak dapat terpisahkan dengan Belanja Daerah. (Rozali Abdullah, 2002). Menurut Feni Rosalia (1984) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Berasal dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada Daerah dan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan masih terdapat potensinya di Daerah.
2. Berasal dari penerimaan jasa-jasa pelayanan daerah.
3. Berasal dari pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah.
4. Berasal dari penerimaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Berasal dari pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan langsung daerah tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa, Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya hak dan wewenang yang diberikan kepada Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, merupakan upaya untuk Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan dan menghitung potensi, kemudia membandingkannya dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila terdapat perbedaan yang sangat besar, maka harus segera diteliti kelemahan yang ada. (Hamrolie, 1990). Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Maka dari itu daerah diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak yang merupakan pajak daerah, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pajak tersebut dapat dipungut hampir di setiap daerah. Berikut ini adalah jenis pajak daerah, yaitu:

- a. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Menurut Siagin, Pajak Daerah merupakan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan Peraturan Undang-undang yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik. Dengan demikian, pajak daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan Peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah dan membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Adanya pembatasan jenis pajak provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah. Provinsi dapat tidak memungut pajak yang telah ditetapkan jika apabila hasilnya kurang memadai. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan Undang-undang. Berikut ini kriteria yang harus diikuti:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelesatarian lingkungan

Apabila terdapat pajak daerah yang tidak memenuhi satu dari kriteria di atas, maka akan dipertimbangkan kembali untuk dibatalkan pengesahannya. Dalam Undang-

undang No. 34 Tahun 2000, Pemerintah Pusat dapat meminta daerah untuk membatalkan pajak-pajak yang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan besarnya tarif yang berlaku untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pemisahan antara pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota diharapkan tidak terjadinya pengenaan pajak berganda. Pajak daerah yang baik adalah pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepala daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Maka dari itu, pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya;
- c. Biaya administrasinya rendah;
- d. Tidak mencampuri system perpajak pusat;
- e. Kurang dipengaruhi oleh “*Business Cycle*” tetapi dapat berkembang dengan meningkatkan kemakmuran;
- f. Beban pajak relatif seimbang dan “*Tax Base*” yang sama diterapkan secara nasional.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai bentuk atas pembayaran pemakaian atau pembayaran karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, dan jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. (Josef Kaho Riwu, 2005:171). Maka dari itu, Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung yang dapat ditunjuk dalam pemungutan retribusi;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan dan mengenyam jasa yang disediakan Daerah;
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maka, retribusi merupakan pendapatan yang berasal dari usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan mewajibkan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan. Contoh Retribusi Jasa Umum antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil, dan lain-lain.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Contoh Retribusi Jasa Usaha antara lain: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi Tempat Pelanggan, dan lain-lain.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang mana Pemerintah Daerah memberi izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, penggunaan Sumber Daya Alam, saran dan prasarana, serta fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh Retribusi Perizinan Tertentu antara lain: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penugasan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan diperuntukan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Jadi, daerah dapat mendirikan perusahaan yang khusus untuk menambah penghasilan daerah. Dalam hal ini, hasil laba dari perusahaan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Daerah, namun sifat dari perusahaan tersebut tidak berorientasi pada *Profit* seperti perusahaan Sektor Privat. Perusahaan daerah harus memberikan jasa dan kemanfaatan umum, dalam arti lain perusahaan daerah melakukan fungsi ganda, yaitu fungsi social dan fungsi ekonomi agar tetap terjalinnya keseimbangan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan daan bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerurugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lainnya sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, asuransi, hibah, pengadaan barang dan jasa, penerimaan hasil pemanfaat daerah, penerimaan-penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, dan dari kegiatan lainnya yang merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Keuntungan selisih kurs terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD;
- p. Pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.2.2 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini karena banyak tarif pajak daerah yang ditetapkan sejak lama dan belum dilakukannya perubahan. Akibatnya tarif pajak tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga.
2. Penetapan jenis pajak baru harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku terhadap potensi wajib pajak baru yang ada di setiap daerah.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian daerah.
4. Memfasilitasi investor domestik dan asing yang akan berinvestasi di daerah.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil terkait dalam pengelolaan pendapatan yang dilakukan.

7. Intensifikasi adalah cara yang dapat dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan serta prosedur keuangan sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
8. Melakukan ekstensifikasi dengan cara menggali sumber pendapatan daerah. Seperti penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

2.2.3 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan ketentuan-ketentuan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Klasifikasi APBD menurut akun kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, yang meliputi:
 - a. Kewenangan pengelolaan Pajak daerah adalah SKPD atau SKPKD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak.
 - b. Kewenangan pengelolaan Retribusi daerah adalah SKPD.
 - c. Kewenangan pengelolaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah SKPKD.
 - d. Kewenangan pengelolaan Lain-lain PAD yang sah adalah SKPKD kecuali Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait, Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait, dan Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.
3. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
4. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
5. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Pemerintah daerah dilarang untuk:
 - a. Melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.
 - b. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategi nasional.

8. Kepala Daerah yang melakukan pungutan akan dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
9. Hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas Negara.

2.2.4 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan membandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill Pemerintah Daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio Efektivitas, maka kemampuan Pendapatan Asli Daerah semakin baik. Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas harus disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Gambar 2. 1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

(Windhu, 2018:64)

Menurut Windhu (2018:63) menyebutkan kriteria tingkat efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Windhu Putra, 2018

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Menghitung rasio efisiensi dilakukan karena

meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, namun jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target PAD tersebut lebih besar maka, Pemerintah Daerah dianggap belum efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Gambar 2. 2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

(Windhu, 2018:64)

Menurut Windhu (2018: 64) menyebutkan kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Windhu Putra, 2018

2.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Belanja modal merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegunaan belanja modal adalah untuk sarana pelayanan masyarakat. Belanja modal membutuhkan biaya yang besar dan berdampak jangka panjang, maka dari itu harus dipastikan lagi tingkat efektivitas dan efisiensinya agar pengeluaran yang telah dilakukan tidak sia-sia. Pembangunan infrastruktur produktif merupakan inti dan basis kemajuan perekonomian bangsa, seperti prasarana pasar,

jalan, jembatan, listrik, pos polisi, dan lain-lain. Penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) menggunakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD, Permendagri Nomor 17 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

2.3.1 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Tanah
Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk pengeluaran yang bersifat administratif dan pembebasan lahan.
2. Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent Expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan dikapitalisasi.
3. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kondisi siap pakai. Termasuk pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent Expenditure*) jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi persyaratan dikapitalisasi.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk penganggaran aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
6. Belanja Aset Lainnya
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak dapat memenuhi kriteria aset tetap, namun harus disajikan pada pos aset lainnya. Berikut ini adalah kriteria aset lainnya, antara lain:
 - a. Dapat diidentifikasi
 - b. Tidak memiliki wujud fisik
 - c. Digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan untuk tujuan lainnya dan hak atas kekayaan intelektual

- d. Dapat dikendalikan oleh entitas
- e. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang.

2.3.2 Penganggaran Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penganggaran Belanja Modal, antara lain:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memiliki pengaruh langsung dalam pelayanan publik.
2. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap sepanjang memenuhi kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan masa manfaat ekonomi, serta yang memberikan peningkatan mutu kinerja dapat dianggarkan sebagai belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2.3.3 Manfaat Belanja Modal

- a. Kenaikan *Output* fisik yang disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas, perbaikan lokasi, dan perubahan dalam waktu penjualan.
- b. Manfaat yang *Included* oleh proyek seperti, *Multiplier Effect* proyek.
- c. Manfaat yang disebabkan oleh *Economics Of Scale*.
- d. Manfaat yang menimbulkan adanya perubahan dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan dan keahlian.
- e. Perbaikan lingkungan hidup.
- f. Perbaikan pemandangan.
- g. Perbaikan distribusi pendapatan.
- h. Integrasi nasional.
- i. Pertahanan nasional.

2.3.4 Kebijakan Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjelaskan tentang kebijakan dalam penganggaran belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Belanja modal harus dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan mesin seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, dan inventaris kantor dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang nilainya signifikan.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dianggarkan dibangun serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam aset tetap yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Setelah biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap seperti biaya rehabilitasi dan renovasi sepanjang memenuhi batas minimal kapasitas aset, memperpanjang masa manfaat, dan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan transparan.
6. Penganggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang yang ada.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah harus berpedoman dengan standar barang, standar harga, dan penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari pada penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian dan teori yang digunakan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi mengenai penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Bogor.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator Penelitian	Metode Analisis	Metode Analisis
1.	Fitri. S Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2020)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 	Regresi Linear Sederhana	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

			<p>4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>5) Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>6) Belanja Aset Lainnya</p>		
2.	<p>Yani Rizal & Erpita</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. (2019)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 	<p>Regresi Linear Sederhana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui analisis regresi linear sederhana, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. • Melalui uji t dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. • Dari analisis Koefisien determinasi diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal di Kota Langsa sebesar

			5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya		40,60%, sedangkan selebihnya 59,40% dipengaruhi oleh variabel lain dari luar model penelitian.
3.	Isti Permatasari Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. (2019)	Variabel Independen: • Pendapatan Daerah Variabel Dependen : • Belanja Modal	• Pendapatan Daerah: 1) PAD 2) DAU 3) DAK 4) DBH • Belanja Modal: 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya	Regresi Linear Berganda	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal

4.	<p>Dedi Supriatno</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya.</p> <p>(2016)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 	<p>Regresi Linear Sederhana</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.</p>
5.	<p>Febdwi Suryani & Eka Pariani</p>	<p>Variabel Independen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan

	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.</p> <p>(2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 		<p>terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6.	Roby Fajar Renaldi, Ketut Sunarta,	Variabel Independen:	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif

	<p>dan Sigit Edi Surono</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Bogor Periode Tahun 2009-2018</p> <p>(2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 		<p>terhadap alokasi belanja modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
--	---	---	--	--	--

7.	<p>Wimpi Priambudi</p> <p>Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.</p> <p>(2017)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 	<p>Analisis Koefisien Korelasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. • PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.
----	---	--	---	------------------------------------	---

			5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya		
8.	Vinny Siti Utary Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (2021)	Variabel Independen: • Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : • Belanja Modal	• PAD: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Belanja Modal: 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi,	Regresi Linear Berganda	• Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal dengan memberikan pengaruh sebesar 42,38%, sedangkan sisanya berasal dari faktor-faktor lainnya. • Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal yaitu sebesar 0,651.

			<p>dan Jaringan</p> <p>5) Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>6) Belanja Aset Lainnya</p>		
9.	<p>Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, dan Parmadi</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.</p> <p>(2019)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran • Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran 	<p>Regresi Data Panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh secara signifikan. • Secara parsial DAU yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. • Secara parsial DAK tidak memiliki pengaruh secara signifikan. • PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

		<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 		
10.	<p>Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah 	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, namun pengaruhnya tidak signifikan. • Dana perimbangan memiliki pengaruh

	<p>Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan <p>Variabel Dependen</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan : 1) Dana Alokasi Umum 2) Dana Alokasi Khusus 3) Dana Bagi Hasil Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 	<p>positif terhadap belanja modal, namun pengaruhnya tidak signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
--	---	---	--	---

11.	<p>Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.</p> <p>(2017)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan : <ol style="list-style-type: none"> 1) DAU 2) DAK 3) DBH • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, 	<p>Regresi Linear Berganda dan Koefisien Korelasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. • Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.
-----	--	---	--	---	--

			<p>2) Belanja Peralatan Mesin</p> <p>3) Belanja Gedung dan Bangunan</p> <p>4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>5) Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>6) Belanja Aset Lainnya</p>		
13.	<p>Abel Rinaldi</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>(2016)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1) DAU 2) DAK 	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Sumatera Selatan. • Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

		<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<p>3) DBH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Sumatera Selatan.
14.	<p>Egi Nofrizal</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB berdasarkan setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. • Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif

	<p>Modal Pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015 (2017)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<p>2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya 		<p>terhadap belanja modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. • Naik turunnya belanja modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 62%, sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
15.	Dewi Ayu Wulandari	Variabel Independen:	<ul style="list-style-type: none"> • PAD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak Daerah 	Analisis Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

	<p>dan Sri Rahayu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal (2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan rasio efisiensi Pemerintah Daerah. • Belanja Modal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Peralatan Mesin 3) Belanja Gedung dan Bangunan 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 	<p>terhadap belanja modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. • Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
--	--	--	---	--

			6) Belanja Aset Lainnya		
--	--	--	-------------------------------	--	--

Tabel 2. 4.

Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel Independen	Variabel Dependen	
	(Belanja Modal)	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah	Fitri. S (2020); Yani Rizal & Erpita (2019); Isti Permatasari (2019); Dedi Suprianto (2016), Roby Fajar Renaldi, Ketut Sunarta, dan Sigit Edi Surono (2021); Wimpi Priambudi (2017); Vinny Siti Utary (2021); Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata (2019); Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017); Nissa Anggit Pratiwi (2019); Abel Rinaldi (2016); Egi Nofrizal	Febdwi Suryani & Eka Pariani (2018); Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, dan Parmadi (2019).

	(2017); Dewi Ayu Wulandari dan Sri Rahayu (2021).	
--	---	--

2.4.2 Kerangka Penelitian

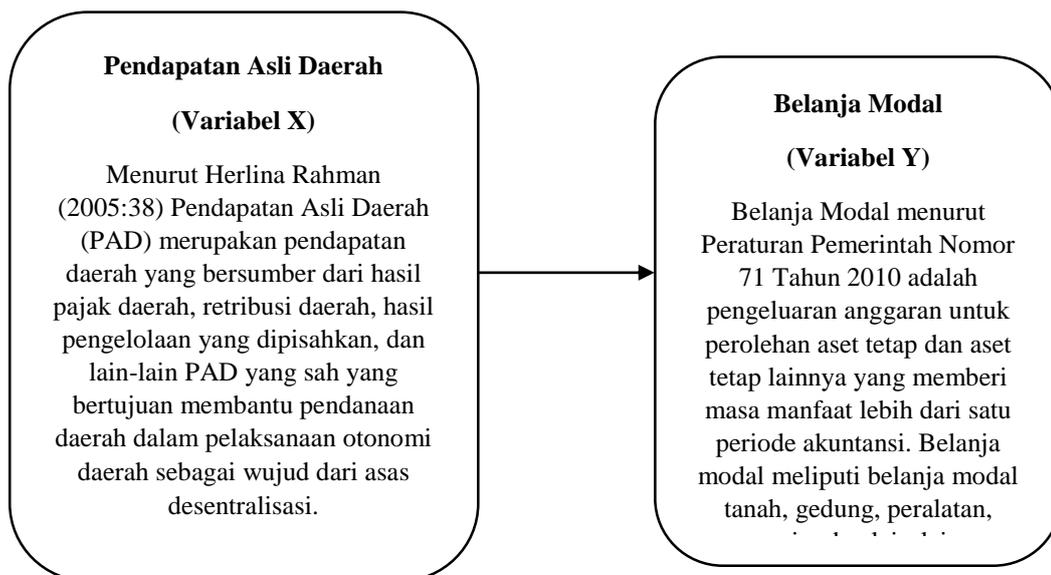
Menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan membantu pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan tolak ukur kemampuan daerah masing-masing. Besarnya Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap besarnya pengalokasian belanja modal setiap daerah, yang mana nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas yang berorientasi kepada kepentingan publik. Namun, kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan efektif apabila rasio efektivitasnya mencapai 100%. Apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka kemampuan suatu daerah pun semakin baik. Hal ini berarti pemerintah daerah telah maksimal dalam merealisasikan target penerimaan daerah dan memanfaatkan penyerapan anggaran belanja modal yang ada dengan baik.

Untuk melihat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Kota Bogor, penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk mengetahui posisi keuangan dan menilai kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam suatu periode tertentu. Hasil yang didapatkan dalam analisis Rasio Efektivitas ini dapat menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Bogor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri. S (2020) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Dedi Suprianto (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya” juga mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.



Gambar 2. 3 Konstelasi Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat. Maka, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas, dan satu variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dalam memperoleh data dan informasi, penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kota Bogor yang sumber datanya berasal dari Laporan Keuangan Daerah Kota Bogor dari tahun 2015-2020. Lokasi penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor yang bertempat di Jl. Pemuda No. 31, Tanah Sereal, Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan asosiatif kausal. Menurut Yusuf (2017:62) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono (2017) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berbentuk angka *Absolute* sehingga dapat ditentukan besarnya. Metode pengumpulan data kuantitatif sangat bergantung pada pengambilan sampel dan instrument pengambilan data. Metode pengumpulan data kuantitatif sangat bergantung pada pengambilan sampel secara acak dan instrument pengumpulan data yang

terstruktur, sehingga data yang dihasilkan mudah untuk diringkas, dibandingkan, dianalisis, dan digeneralisasi.

Sumber data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber tertulis milik orang pribadi, perpustakaan, kantor, dan pemerintah yang berupa laporan, profil, dan buku pedoman. Hasil dari data sekunder biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2015) operasionalisasi variabel adalah suatu atribut atau sifat dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menentukan variabel secara operasional menjadi hal yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kredibilitas pada metodologi dan memastikan reproduktifitas hasil penelitian.

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X)	Hasil Pajak Daerah	PAD = Hasil Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah $Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$	Rasio
	Retribusi Daerah		
	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	Lain-lain PAD yang Sah		
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Gedung dan bangunan + Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya $Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Target\ Penerimaan\ Belanja\ Modal} \times 100\%$	Rasio
	Belanja Gedung dan Bangunan		
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	Belanja Aset Tetap Lainnya		
	Belanja Aset Lainnya		

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Hardani dkk (2020) metode pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam sebuah penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan dengan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2020. Laporan Keuangan diperoleh dengan cara memperoleh data pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif diukur dengan membandingkan teori yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel. Rasio efektivitas yang dihasilkan akan dilihat kategorinya berdasarkan kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Jenis penelitian asosiatif kausal menggunakan teknik analisis statistik dengan aplikasi *Statistikal Product and Service Solution* (SPSS). Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusinya normal maupun mendekati normal. Menurut Sobur Setiawan (2021) Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang didapatkan sesuai dengan distribusi teoritik. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari:

- 1 Histogram
- 2 Uji Normality Plot With Test

Melalui *Uji Normality Plot With Test*, dapat dikatakan bahwa variabel berdistribusi normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nilai *Significant* lebih dari 5%.
- b) Nilai *Skewness* dibagi dengan nilai *Standard Error*, dengan nilai tidak lebih dari 1,95 (5%) atau 2,58 (1%).

2. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heterokedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terjadi perbedaan antara residual pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya, maka disebut heterokedastisitas. Namun

apabila residual pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya tetap, maka disebut dengan homokedasitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadinya heterokedasitas. Dalam pengujiannya, dapat dilakukan dengan uji Glejser, apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung heterokedasitas.

3. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolonieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinier atau tidak dan ditemukannya korelasi yang sempurna antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terhindar dari multikolonieritas. Berikut ini adalah kriteria ada tidaknya yang dapat dideteksi, yaitu:

- a. Nilai R^2 sangat tinggi, namun secara sendiri-sendiri regresi antara variabel bebas dan terikat tidak signifikan.
- b. Korelasi antar variabel bebas sangat tinggi, yaitu di atas 0,8.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson, apabila nilai Durbin Watson hitung mendekati atau sekitar 2 maka model regresi tersebut bebas dari uji autokorelasi. Berikut ini adalah kriteria pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, antarlain:

- 1 Nilai Durbin Watson antara 0-1,5 artinya, terdapat autokorelasi positif.
- 2 Nilai Durbin Watson antara 1,5-2,5 artinya, tidak terdapat autokorelasi.
- 3 Nilai Durbin Watson antara 2,5-4 artinya, terdapat autokorelasi negatif.

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2017) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Selain karakteristik hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan terikat yang terjadi. Melalui koefisien determinasi, seberapa

jauh suatu variabel bebas menentukan perubahan nilai variabel terikat dapat diketahui. Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu.

3.6.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Sugiyono (2018) Uji t adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji t ini merupakan rancangan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti. Pengambilan kesimpulan uji t adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan apabila t-hitung > t-tabel dengan taraf signifikan 5%, maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t-hitung < t-tabel maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh parsial antara variabel bebas independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel dependen Belanja Modal di Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020.

$H_0=0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial (Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020).

$H_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial (Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020)

Menurut Nuryadi dkk (2017) untuk menginterpretasikan uji t, nilai t-hitung akan dibandingkan dengan nilai t-tabel, dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 : ditolak jika t-hitung > t-tabel, berbeda secara signifikansi

H_0 : diterima jika t-hitung < t-tabel, tidak berbeda secara signifikansi

$$R^2 = \frac{\alpha \sum Y + b \sum XY - n(\bar{Y})^2}{\sum Y^2 - n(\bar{Y})^2}$$

Gambar 3. 1 Rumus Koefisien Determinasi

(Wirawan, 2016:246)

Keterangan:

R^2 : Koefisien Determinasi

\bar{Y} : Rata-rata Belanja Modal

- X : Pendapatan Asli Daerah
 Y : Belanja Modal
 n : Jumlah Data
 α : Konstanta Intersep
 b : Koefisien Regresi (*Slope*)

3.6.4 Regresi Linear Sederhana

Regresi linear adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara 1 (satu) variabel dependen dengan 1 (satu) atau lebih variabel independen. Apabila hanya digunakan satu variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut regresi linear sederhana (*Simple Linear Regression*). Analisis regresi memiliki kegunaan, antara lain sebagai berikut:

- 1 Untuk mendeskripsikan fenomena data atau kasus yang sedang diteliti melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik.
- 2 Untuk mengontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh.
- 3 Sebagai prediksi untuk variabel terikat.

Model regresi sederhana adalah model *Probabilistic* yang menyatakan hubungan linier antara dua variabel di mana salah satu variabelnya dianggap memengaruhi variabel yang lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang memengaruhi disebut variabel independen. Variabel dependen pada regresi linear disebut dengan *Respon* atau *Criterion*. Respon variabel pada regresi linear berupa variabel kontinu. Sedangkan variabel independen dikenal sebagai *Predictor*. *Predictor* pada regresi linear dapat berupa variabel kontinu, indikator, dan kategorik yang disubstansikan menjadi variabel indikator. Adapun rumus regresi linear sederhana, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bx$$

Gambar 3. 2 Rumus Analisis Regresi Sederhana

(Purba, 2019:109)

Besarnya konstanta α dan β dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Gambar 3. 3 Rumus Koefisien Regresi

(Purba, 2019:122)

$$\alpha = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Gambar 3. 4 Rumus Konstanta Intersep

(Purba, 2019:122)

Keterangan:

- \bar{Y} : Rata-rata Belanja Modal
- \bar{X} : Rata-rata PAD
- Y : Belanja Modal
- X : Pendapatan Asli Daerah
- α : Konstanta Intersep
- b : Koefisien Regresi (*Slope*)
- n : Jumlah Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hasil Pengumpulan Data

Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kedudukan Kota Bogor secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta yang merupakan potensi strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional dan industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor memiliki ketinggian rata-rata minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor mempunyai suhu rata-rata 26° C per bulan dengan suhu terendah 21,8° C dan suhu tertinggi 30,4° C. kelembapan udara di Kota Bogor adalah 70% dengan curah hujan rata-rata 3.500 – 4.000 mm setiap tahunnya dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember dan Januari.

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha dengan kepadatan 9.075 jiwa/km². Secara administratif, Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi, dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.721 RT, dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Objek penelitian ini menggunakan dua variabel untuk diteliti, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Unit analisis yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor yang didapatkan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 31, Tanah Sereal, Kota Bogor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor:



Sumber: Website bkad.kotabogor.go.id

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

Berikut ini merupakan data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih
2015	627.815.080.243	627.597.050.141	(218.030.102)
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	55.842.763.286
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	60.409.135.497
2018	875.230.630.511	912.197.971.288	36.967.340.777
2019	972.607.023.370	1.015.884.216.920	43.277.193.550
2020	741.531.123.201	872.017.242.152	130.486.118.951

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020

Tabel 4. 2

Data Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2015	688.722.043.107	440.919.551.227	(247.802.491.880)
2016	701.582.651.180	552.484.517.036	(149.098.134.144)
2017	507.090.025.022	433.491.716.724	(73.598.308.298)
2018	512.432.788.564	455.461.723.593	(56.971.064.971)
2019	630.349.995.579	501.033.407.778	(129.316.587.801)
2020	307.168.807.801	276.157.283.029	(31.011.524.772)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020

4.2 Analisis Deskriptif

Menghitung rasio Efektivitas bertujuan untuk melihat dan menggambarkan bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rasio Efektivitas ini berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap menyediakan pelayanan masyarakat yang mana hal ini merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi yang dapat dihasilkan dibandingkan target yang ditetapkan, maka hal ini dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya. Untuk menghitung rasio Efektivitas, peneliti menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*.

4.2.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. 3

Tabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2015	627.815.080.243	627.597.050.141	99,97%	Efektif
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	108%	Sangat Efektif
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	107%	Sangat Efektif
2018	875.230.630.511	912.197.971.288	104%	Sangat Efektif
2019	972.607.023.370	1.015.884.216.920	104%	Sangat Efektif
2020	741.531.123.201	872.017.242.152	118%	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Microsoft Excel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor pada tahun 2015-2020 sudah terbilang efektif. Walaupun pada tahun 2015, persentase efektivitasnya tidak mencapai 100% tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota bogor sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dari tahun 2016-2020, presentase efektivitasnya melebihi 100%, yang artinya Pemerintah Kota Bogor sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Rasio Efektivitas Belanja Modal

Tabel 4. 4

Rasio Efektivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
-------	----------	-----------	-------------------	------------

2015	688.722.043.107	440.919.551.227	64%	Kurang Efektif
2016	701.582.651.180	552.484.517.036	79%	Kurang Efektif
2017	507.090.025.022	433.491.716.724	85%	Cukup Efektif
2018	512.432.788.564	455.461.723.593	89%	Cukup Efektif
2019	630.349.995.579	501.033.407.778	79%	Kurang Efektif
2020	307.168.807.801	276.157.283.029	90%	Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Microsoft Excel

Dapat dilihat dari Tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 2019 Pemerintah Kota Bogor kurang efektif dalam mengelola anggaran belanja modal. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 sudah cukup efektif dalam mengelola belanja modal. Walaupun tingkat belanja modal kota bogor pada tahun 2020 terbilang rendah, namun pada tahun tersebut Pemerintah Kota Bogor efektif dalam mengelola belanja modal selama 6 tahun berturut-turut. Artinya, pemerintah Kota Bogor sudah maksimal dalam menyerap atau membelanjakan belanja modal demi kepentingan umum.

4.3 Analisis Variabel

Pengujian mengenai penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dilakukan menggunakan teknik analisis dengan aplikasi *Statistikal Product and Service Solution* (SPSS) dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Sedangkan untuk mengukur rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menggunakan aplikasi Ms. Excel.

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari model penelitian ini memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bisa, dan konsisten. Maka dari itu, sebelum melakukan analisis regresi, peneliti memutuskan untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil dari uji asumsi klasik dapat dilihat dibawah ini:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki distribusi normal atau tidak. Terdapat dua metode untuk melihat uji normalitas, yaitu dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* dan metode *Shapiro-Wilk*. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikan di atas

0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal. Berikut ini adalah uji normalitas yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Sig.	Statistik	df	Sig.
Unstandardized Residual	.257	6	.200*	.884	6	.287

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan SPSS

Berdasarkan hasil *Tests of Normality* di atas sebagaimana disebutkan dalam lampiran 9, dihasilkan sebagai berikut:

- a. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa residual data memiliki distribusi normal dengan nilai signifikan $0,200 > 0,05$.
- b. Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa residual data memiliki distribusi normal dengan nilai signifikan $0,287 > 0,05$. [$W(6)=0884$, $P=0,287$].

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinearitas. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Namun, pada penelitian ini tidak dapat dilakukan uji multikolinearitas karena hanya terdiri dari 1 variabel independen. Jadi, tidak terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen.

Tabel 4. 6

Tabel Uji Multikolineritas

Coefficients^a

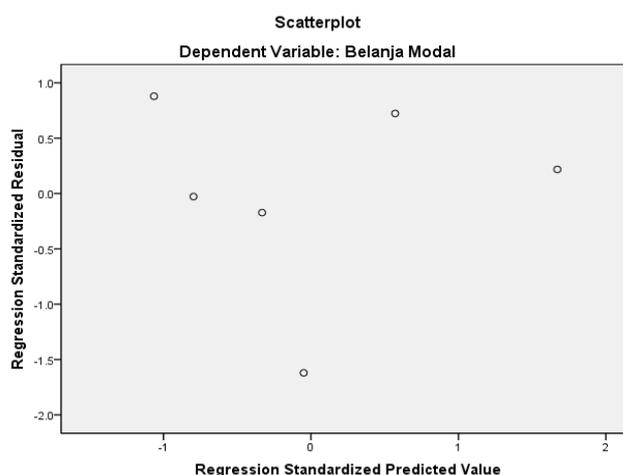
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	914.997	422.039		2.168	.096					
PAD	-.413	.483	-.393	-.856	.440	-.393	-.393	-.393	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan SPSS

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidakpastian variance dari residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan uji *Glejser* dan dengan *Scatterplot*. Penelitian ini menggunakan *Scatterplot* dalam menguji terjadinya gejala heterokedastisitas. Berikut ini adalah gambar *Scatterplot* yang dihasilkan:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan SPSS

Gambar 4. 2 Scatterplot

Dari diagram yang dihasilkan dalam pengujian di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu x dan sumbu

y, serta tidak membentuk pola atau tidak beraturan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan diagram Scatterplot di atas, pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau bersifat Homokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini terdapat kesalahan pada periode t dengan periode sebelumnya. Apabila uji Durbin Watson mendekati atau sekitar 2, maka model regresi yang digunakan terbebas dari Autokorelasi. Berikut ini adalah cara yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk Durbin Watson antara lain:

- a. Jika $d < dL$ atau $d > 4-dL$, maka terdapat Autokorelasi.
- b. Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak terdapat Autokorelasi.
- c. Jika $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$, tidak dapat disimpulkan.

Terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, yaitu:

1. Nilai Durbin Watson antara 0-1,5 artinya, terdapat autokorelasi positif.
2. Nilai Durbin Watson antara 1,5-2,5 artinya, tidak terdapat autokorelasi.
3. Nilai Durbin Watson antara 2,5-4 artinya, terdapat autokorelasi negatif.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistiks					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.393 ^a	.155	-.057	153.015	.155	.732	1	4	.440	2.049

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan SPSS

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi yang dilakukan sebagaimana lampiran 9, dapat disimpulkan bahwa:

n	: 6	dU	: 1,4002
d	: 2,049	4-dU	: 2,5998
k	: 1	dL	: 0,6102
		4-dL	: 3,3898

Hasil ini menunjukkan kondisi $dU < d < 4-dU$ atau $1,4002 < 2,049 < 2,5998$. Lalu, berdasarkan kriteria yang ada, Durbin Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 2,049 yang mana angka ini berada pada kisaran 1,5-2,5. Hal ini berarti tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Uji koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Berikut ini adalah hasil uji determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistiks				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
dimensi 1 on0	.393 ^a	.155	-.057	153.015	.155	.732	1	4	.440	2.049

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data sekunder dengan SPSS

Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 9, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,155. Besarnya angka koefisien determinasi tersebut sama dengan 15,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 15,5% dan sisanya yaitu sebesar 84,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Faktor-faktor lain diluar model ini dapat dijelaskan dalam tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Lanjutan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
dimension0 1	1.000 ^a	1.000	.	.	1.756

a. Predictors: (Constant), DAK, DBHBP, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data sekunder dengan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi yang disebutkan dalam lampiran 10, dapat dilihat bahwa besarnya R^2 sebesar 1,000 atau 100% yang mana variabel yang digunakan dalam penelitian lanjutan ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Jadi, dapat diambil kesimpulan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 100%.

4.3.3 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji Hipotesis atau Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Uji t ini digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis dan mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Pengambilan kesimpulan pada uji t adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan taraf signifikan 5%, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah hasil dari Uji Hipotesis (Uji t):

Tabel 4. 10

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	914.997	422.039		2.168	.096
Pendapatan Asli Daerah	-.413	.483	-.393	-0.856	.440

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan SPSS

Berdasarkan uji hipotesis di atas sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran 9, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan tabel *Coefficients*, dihasilkan nilai Signifikan sebesar $0,440 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Berdasarkan nilai t, diketahui nilai t_{hitung} sebesar $-0,856 < t_{\text{tabel}} 2,776$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Cara mencari t_{tabel} :

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (\alpha/2 : n-k-1) \\
 &= (0,05/2 : 6-1-1) \\
 &= (0,025:4) \text{ [lihat pada distribusi } t_{\text{tabel}} \\
 &= 2,776
 \end{aligned}$$

4.3.4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menyatakan hubungan linier antara dua variabel yang mana salah satu variabelnya dianggap dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Berikut ini adalah hasil analisis statistik regresi linear sederhana pada penelitian ini:

Tabel 4. 11

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	914.997	422.039		2.168	.096
	Pendapatan Asli Daerah	-.413	.483	-.393	-.856	.440

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder dengan SPSS

Berikut adalah hasil Uji Regresi Linear Sederhana sebagaimana disebutkan dalam lampiran 9, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Hasil yang ditunjukkan Tabel 4.11 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 914,997 - 0,413X$$
- 2 Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,413 dan bernilai negatif. Artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen Belanja Modal akan mengalami penurunan juga sebesar -0,413.
- 3 Nilai konstanta sebesar 914,997. Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah tetap atau sama dengan 0 (nol), maka variabel Belanja Modal sebesar 914,997 rupiah.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Kota Bogor Tahun 2015-2020 menggunakan aplikasi *Statistikal Product and Service Solution* (SPSS) dan *Microsoft Excel* tentang bagaimana efektivitas Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal serta faktor yang mempengaruhi belanja modal, maka peneliti menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian sebagai berikut:

4.3.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor melampaui target anggaran yang ditetapkan, artinya Pemerintah Kota Bogor berhasil menggali berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Bogor dengan maksimal. Sedangkan pada tahun 2015, walaupun realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan target anggaran yang ditetapkan, namun perolehan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Pemerintah Kota Bogor terbilang sudah maksimal dengan persentase Efektivitas hampir 100%. Maka dari itu, hipotesis diterima.

Salah satu penyebab mengapa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Bogor efektif yaitu, disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajaknya, serta badan usaha juga yang taat dalam membayar pajak dan iuran retribusi. Karena apabila dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015-2020, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor ialah pendapatan yang dihasilkan oleh pajak daerah.

Menurut Windhu Putra (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%. Efektivitas yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi padaa sektor publik, dapat dikatakan semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah daerah semakin baik. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat berdampak pada pengalokasian Belanja Daerah yang dapat terealisasikan dengan baik pula. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kepada publik dengan baik. Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi juga menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah tersebut sudah cukup mandiri dalam mengelola sendiri daerahnya tanpa bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

4.3.2 Efektivitas Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015, 2016, dan 2019 belum efektif. sedangkan pada tahun 2017,2018, dan 2020 Pemerintah Kota Bogor sudah efektif dalam mengelola Belanja Modal.

Pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 64% (Kurang Efektif), hal ini terjadi karena adanya belanja modal yang tidak direalisasikan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kota Bogor. Anggaran belanja modal tanah hanya terealisasi sebesar 14% atau sekitar Rp 8 Miliar dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 59 Miliar. Maka dari itu, hipotesis ditolak.

Pada tahun 2016 tingkat efektivitas Belanja Modal di Kota Bogor sebesar 79% (Kurang Efektif), hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Bogor belum maksimal dalam mengelola belanja modal khususnya belanja modal Bangunan dan Gedung yang mana pada tahun ini anggaran yang diserap hanya sebesar Rp 156 Miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 219 Miliar. Maka dari itu, hipotesis ditolak.

Pada tahun 2017 tingkat efektivitas Belanja Modal di Kota Bogor sebesar 85% (Cukup Efektif). Pemerintah Kota Bogor telah memaksimalkan penyerapan anggaran belanja modal walaupun pada Belanja Modal Tanah hanya menyerap 28% atau setara dengan Rp 1,4 Miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 5,1 Miliar. Maka dari itu, hipotesis diterima.

Pada tahun 2018 tingkat efektivitas Belanja Modal di Kota Bogor sebesar 89% (Cukup Efektif), efektivitas tahun ini lebih besar tahun sebelumnya. Setiap belanja yang dianggarkan pada tahun ini dapat direalisasikan secara optimal. Pada tahun ini, Pemerintah Kota Bogor hanya merealisasikan belanja untuk Aset Tetap Lainnya hanya sebesar Rp 1,7 Miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,7 Miliar. Walaupun demikian, belanja modal yang lainnya telah direalisasikan dengan baik, maka dari itu hipotesis diterima.

Pada tahun 2019 tingkat efektivitas Belanja Modal di Kota Bogor sebesar 79% (Kurang Efektif), terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun angka realisasi Belanja Modal pada tahun ini terbilang tinggi, namun Pemerintah Kota Bogor belum cukup efektif dalam mengelola Belanja Modal. Maka dari itu, hipotesis ditolak.

Pada tahun 2020 tingkat efektivitas Belanja Modal di Kota Bogor sebesar 90% (Efektif). Belanja Modal yang dikelola Pemerintah Kota Bogor pada tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini terdapat belanja modal yang tingkat realisasinya rendah yaitu Belanja Modal Tanah yang hanya direalisasikan sebesar Rp 2,7 Miliar atau sebesar 37% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 7,4 Miliar, namun sisanya direalisasikan secara maksimal. Maka dari itu, hipotesis diterima.

Salah satu penyebab realisasi Belanja Modal yang tidak efektif adalah disebabkan oleh rendahnya pengadaan tanah dan bangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya koordinasi antar perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga belanja yang sudah dianggarkan tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran tersebut. Hal ini juga dapat disebabkan karena terjadinya gagal lelang tender proyek pada tahun anggaran tersebut, sehingga pembangunan yang sudah dianggarkan tidak dapat diserap

pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan penyebab realisasi Belanja Modal yang tinggi dapat disebabkan oleh terjadinya percepatan pembangunan infrastruktur dan banyaknya pembangunan yang menjadi fokus Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kota Bogor mulai menggenjot pembangunan infrastrukturnya.

Realisasi anggaran Belanja Modal yang efektif berdampak pada kinerja pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, apabila tingkat Belanja Modal yang direalisasikan Pemerintah Kota Bogor rendah hal ini akan berdampak pada terjadinya surplus anggaran yang mana merujuk pada kejadian tidak terserapnya anggaran. Hal ini akan berdampak bagi masyarakat, karena program pemerintah menjadi tersendat padahal terkadang program-program yang dianggarkan ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan yang medesak bagi masyarakat. Sedangkan, pengukuran kinerja pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya, apabila Belanja Modal tidak dapat terealisasi dengan baik, maka berpengaruh terhadap penilaian kinerja keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh hasil dengan nilai probabilitas t lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Apabila dibandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka diketahui nilai t hitung sebesar $-0,856 < t_{\text{tabel}} 2,776$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka hipotesis ditolak.

Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,155, artinya pada model penelitian ini presentase pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal hanya sebesar 15,5% dan sisanya sebesar 84,5% berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hal ini artinya bahwa perkembangan belanja modal belum bisa dipengaruhi oleh perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi di Kota Bogor periode tahun 2015-2020. Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor lebih banyak dialokasikan untuk Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani & Eka Pariani (2018); Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, dan Parmadi (2019) yang

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 4. 12
Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Ditolak

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020 dapat dikategorikan efektif dengan presentase rasio efektivitasnya lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2015 rasio efektivitasnya sebesar 99,97% namun dapat dikategorikan efektif.
2. Kinerja pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan dan mengelola Belanja Modal pada tahun 2017, 2018, dan 2020 dapat dikategorikan efektif. Hal ini dikarenakan presentase rasio efektivitas Belanja Modal Kota Bogor pada tahun tersebut lebih dari 80%, yang mana apabila dilihat dari kriteria efektivitas keuangan daerah, angka tersebut yaitu masing-masing sebesar 85%, 89%, dan 90% sudah dapat dikategorikan efektif. Sedangkan, kinerja pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan dan mengelola Belanja Modal pada tahun 2015, 2016, dan 2019 tidak efektif. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya koordinasi antar perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga belanja yang sudah dianggarkan tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran tersebut.
3. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bogor. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,155 atau 15,5% yang artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal hanya sebesar 15,5% dan sisanya sebesar 84,5% berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran bagi Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan memperbaiki dan menggali sumber-sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah Kota Bogor dapat menerapkan strategi prioritas yang dapat dilakukan guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Kota Bogor perlu melakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak yang ada, sehingga dapat lebih diketahui potensi pajak daerah yang sebenarnya untuk dijadikan target penerimaan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Meningkatkan peran dan kinerja Perusahaan Daerah di Kota Bogor agar dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.

5. Pengeluaran Belanja Modal dapat lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
6. Meningkatkan koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar Belanja Modal dapat terealisasi dengan baik.

5.2.2 Saran Bagi Masyarakat

1. Masyarakat diharapkan dapat membantu Pemerintah dengan menunaikan kewajiban membayar pajak agar dapat membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Masyarakat dapat ikut serta dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor.
3. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) guna membahas dan menyepakati usulan rencana pembangunan.

5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadikan referensi untuk penelitian sejenis dan diharapkan dapat dikembangkan untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilakukan lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Rasio Keuangan Daerah agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dale, C. (2021). Gegara Corona, Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Kurang dari Rp 1 Triliun. Isu Bogor.com. Tersedia di: <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/bogorian/pr-451698178/gegara-corona-pendapatan-asli-daerah-kota-bogor-kurang-dari-rp-1-triliun> [Diakses 31 Maret 2021].
- Erlina; Rambe, Omar Sakti; dan Rasdianto. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdausy, Carunia Mulya; Made. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Lie Maria; Awaluddin, Imam; dan Maimunah, Emi. (2016) *Pengantar Statistika Ekonomi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Harlan, Johan. (2018). *Analisis Regresi Linear*. Depok: Gunadarma.
- Hasanah, Nuramalia, dan Fauzi, Achmad. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Henaldi, S. (2019). Publikasikan ILPDD, Ini Capaian Pemkot Bogor Sepanjang Tahun 2018. Tribun News.com. Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/29/publikasikan-ilpdd-ini-capaian-pemkot-bogor-sepanjang-tahun-2018> [Diakses 28 Maret 2019].
- Hoesada, Jan. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Majid, Jamaluddin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila.
- Nofrizal, E, Haq, A, dan Surono, S.E. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015. *Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*, 4(2).

- Nuryadi dkk. (2017). *Dasar-dasar Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Permatasari, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riste Akuntansi*, 5(1), 1-17.
- Pratiwi, N.A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*. 3(2), 105-120.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, 6(1), 136-147.
- Priatna, H, dan Purwadinata, J. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Purba, Jan Horas Verady. (2019). *Belajar Mudah Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, Windhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Renaldi, R.F, Sunarta, K, dan Surono, S.E. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bogor Tahun 2009-2018. *Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*, 8(3).
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta.
- Rinaldi, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://repository.unismuh.ac.id>
- Rizal, Y, & Erpita. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.
- S, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Suprianto, D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya. Retrieved from <https://repository.utu.ac.id>.
- Suryani, F, & Pariani, E. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 11-22.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Utary, V.S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(1), 80-96.
- Vanesha, V.T, Rahmadi, S, & Parmadi. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.
- Wati, M.R, dan Fajar, C. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.

- Wirawan, Nata. (2016). *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi dan Bisnis (Statistika Deskriptif)*. Bali: Keraras Emas.
- Wulandari, D.A, dan Rahayu, S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal. *Universitas Telkom Bandung*, 8(5), 5286-5292.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Zulfikar, M. (2021). Pakar Paparkan Penyebab Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Antara News.com Tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/2060118/pakar-paparkan-penyebab-indeks-kemandirian-fiskal-daerah-rendah> [Diakses 24 Maret 2021]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarisya Rizki Putri Kuseriyanto
Alamat : Jl. RE. Soemantadiredja RT 003/007, Kelurahan
Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor.
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 19 Februari 2001
Agama : Islam
Pendidikan :
• SD : SD Negeri Batutulis 2 Bogor
• SMP : SMP Negeri 9 Bogor
• SMA : SMA Rimba Madya Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Maret 2020

Peneliti,

(Tarisya Rizki Putri)

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Izin Meminta Data



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 074 /WD.1/FEB-UP/I/2022 24 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada : Yth. Pimpinan.
BADAN KEUANGAN ASET DAN ASET DAERAH
JL. Pemuda No.31 , Rt.01 /Rw.06 Tanah Sareal
Kota Bogor Jawa Barat 16162.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan data bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk permintaan data ke perusahaan/instansi yang Bapak pimpin ada pun data yang di maksud terlampir.

Maka bersama ini kami hadapkan :

Nama Mahasiswa : Tarisya Rizki Putri Kuseriyanto
NPM : 022118130
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Nomor : 074 /WD.1/FEB-UP/I/2022.
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data.

Permintaan data untuk melengkapi penelitian dengan data berupa :

1. Permintaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 s.d Tahun 2020.

Tujuan : Permohonan permintaan data untuk melengkapi data penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap belanja Modal di Kota Bogor* “

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Lampiran. 2 Surat Izin dari Kesbanpol



PEMERINTAH KOTA BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan R.M Tirto Adhi Soerjo Nomor 2 - Telp./Fax. : (0251) - 8332775
Bogor - 16161

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/0178 - Bakesbangpol

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.

Berdasarkan Surat dari : Dekan Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor :
074/DW.1/FEB-UP/1/2022 Tanggal, 24 Januari 2022 Perihal :
Permohonan Data

Menerangkan bahwa :

a.	Nama	:	Tarisya Rizki Putri Kusheriyanto	NPM : 022118130
b.	Telepon / E-Mail	:	08777967224	
c.	Tempat / Tgl. Lahir	:	Bogor, 19 Februari 2001	
d.	Agama	:	Islam	
e.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa	
f.	Alamat	:	Jl. RE. Soemant Adiredja RT 003 / RW. 007 Kel Pamoyanan Kec Bogor Selatan	
g.	Peserta	:	01 (Orang)	
h.	Maksud	:	Permohonan Data	
i.	Untuk keperluan	:	Permohonan Data	
j.	Lokasi	:	Kota Bogor	
k.	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Badan Keuangan Aset Daerah Kota Bogor	

- Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
- Mohon instansi tersebut dapat mengawasi / memonitor mahasiswa/i, siswa/i dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Dosen/Guru Pembimbing bertanggungjawab agar ikut memberikan pengawasan dan pembinaan kepada mahasiswa/i, siswa/i yang melaksanakan Pra-Riset/Penelitian/Permohonan Data/Observasi/PKL/Magang serta melaporkan perkembangannya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor secara tertulis;
- Agar di dalam pelaksanaan kegiatannya tetap mengikuti Prosedur Protokol Kesehatan, selama masa Pandemi Covid – 19 di Kota Bogor
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan 28 Februari 2022.

Bogor, 02 Februari 2022
a.n. Kepala, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabid Teknologi Wasbang
ART SYAEFUDIN, BA
Pembina, Tk.I
NIP. 19670131 198609 1 001

Lampiran. 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2014 (AUDITED)
1	PENDAPATAN		2.022.270.761.216,00	1.913.210.404.036,00	94,61	1.757.697.381.840,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	627.815.080.243,00	627.597.050.141,00	99,97	544.835.708.254,00
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	387.811.965.615,00	398.435.398.328,00	102,74	376.487.551.008,00
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	59.064.233.000,00	46.219.894.849,00	78,25	77.167.650.951,00
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	26.404.407.715,00	28.807.740.268,00	109,10	23.681.532.602,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	154.534.473.913,00	154.134.016.696,00	99,74	67.498.973.693,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.302.765.733.473,00	1.218.375.878.985,00	93,52	1.188.391.596.875,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	891.582.555.328,00	814.953.434.916,00	91,41	855.645.928.015,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1.1	69.970.282.328,00	50.436.407.660,00	72,08	56.775.301.166,00
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.1.2	18.008.415.000,00	18.067.309.256,00	100,33	33.056.068.849,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.3	737.833.158.000,00	737.833.158.000,00	100,00	732.337.058.000,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.1.4	65.770.700.000,00	8.616.560.000,00	13,10	33.477.500.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	202.799.344.000,00	202.799.344.000,00	100,00	157.301.111.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	202.799.344.000,00	202.799.344.000,00	100,00	157.301.111.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	208.383.834.145,00	200.623.100.069,00	96,28	175.444.557.860,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	208.383.834.145,00	200.623.100.069,00	96,28	175.444.557.860,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	91.689.947.500,00	67.237.474.910,00	73,33	24.470.076.711,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	4.875.000.000,00	162,50	1.034.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	88.689.947.500,00	62.362.474.910,00	70,32	23.436.076.711,00
2	BELANJA	5.1.2	2.312.054.557.369,00	1.862.982.871.234,00	80,58	1.702.962.476.448,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.602.815.285.319,00	1.417.208.614.587,00	88,42	1.200.241.086.485,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.013.083.129.678,00	956.968.389.834,00	94,46	850.211.145.670,00
2.1.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.1.2	481.022.426.081,00	384.060.724.979,00	79,84	299.750.681.278,00
2.1.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.3	4.952.483.331,00	2.415.905.429,00	48,78	352.457.562,00
2.1.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.5	46.687.048.729,00	42.891.089.240,00	91,87	25.272.291.000,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.6	57.070.197.500,00	30.872.505.105,00	54,10	14.654.510.975,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	688.722.043.107,00	440.919.551.227,00	64,02	499.335.882.425,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	59.375.785.000,00	8.347.295.355,00	14,06	100.909.168.329,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	112.392.340.967,00	88.426.943.379,00	78,68	89.106.799.170,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	155.120.933.947,00	95.466.281.082,00	61,54	71.680.596.235,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	360.133.755.877,00	247.091.808.411,00	68,61	227.606.419.678,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.699.227.316,00	1.587.223.000,00	93,41	10.032.899.013,00

Lampiran. 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.158.083.504.950,00	2.152.370.082.886,00	99,74	1.913.210.404.036,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	728.030.823.933,00	783.873.587.219,00	107,67	627.597.050.141,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	465.600.000.000,00	492.138.653.391,00	105,70	398.435.398.328,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	56.330.262.700,00	62.727.631.456,00	111,36	46.219.894.849,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	32.768.361.795,00	33.107.211.225,00	101,03	28.807.740.268,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	173.332.199.438,00	195.900.091.147,00	113,02	154.134.016.696,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.352.588.061.017,00	1.297.444.479.820,00	95,92	1.218.375.878.985,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.146.551.930.117,00	1.097.614.311.436,00	95,73	814.953.434.916,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	75.704.574.000,00	74.818.598.774,00	98,83	50.436.407.660,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	20.733.293.000,00	22.024.549.634,00	106,23	18.067.309.256,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	718.517.152.117,00	806.089.544.000,00	112,19	737.833.158.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	331.596.911.000,00	194.681.619.028,00	58,71	8.616.560.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	77.464.620.000,00	71.052.015.847,00	91,72	67.237.474.910,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	14.106.000.000,00	470,20	4.875.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	74.464.620.000,00	56.946.015.847,00	76,47	62.362.474.910,00
2	BELANJA	5.1.2	2.425.741.153.905,00	2.115.296.888.270,00	87,20	1.862.982.871.234,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.699.787.722.192,00	1.556.442.743.532,00	91,57	1.417.208.614.587,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.136.249.253.519,00	1.044.030.978.405,00	91,88	956.968.389.834,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	530.892.764.217,00	483.099.789.155,00	91,00	384.060.724.979,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.938.951.956,00	2.646.198.572,00	53,58	2.415.905.429,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	27.656.752.500,00	26.636.028.500,00	96,31	42.891.089.240,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	50.000.000,00	29.748.900,00	59,50	30.872.505.105,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	701.582.651.180,00	552.484.517.036,00	78,75	440.919.551.227,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.884.000.000,00	9.338.193.940,00	85,80	8.347.295.355,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	113.085.483.925,00	101.623.727.575,00	89,86	88.426.943.379,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	219.390.311.714,00	156.173.673.849,00	71,19	95.466.281.082,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	357.916.175.341,00	285.046.941.672,00	79,64	247.091.808.411,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	306.680.200,00	301.980.000,00	98,47	1.587.223.000,00

1

Lampiran. 5 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2017



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2016 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.311.874.306.346,00	2.289.359.362.675,33	99,03	2.152.370.082.886,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	917.788.606.450,00	978.197.741.947,33	106,58	783.873.587.219,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	521.166.260.000,00	555.475.409.588,00	106,58	492.138.653.391,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	42.132.557.467,00	49.043.299.929,00	116,40	62.727.631.456,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	29.752.889.788,00	29.949.487.128,00	100,66	33.107.211.225,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	324.736.899.195,00	343.729.545.302,33	105,85	195.900.091.147,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.367.515.899.896,00	1.293.505.562.261,00	94,59	1.297.444.479.820,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.143.528.373.156,00	1.072.486.473.770,00	93,79	1.097.614.311.436,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	94.689.511.214,00	90.543.462.995,00	95,62	74.818.598.774,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	22.024.549.634,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	835.715.338.942,00	791.929.143.000,00	94,76	806.089.544.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	213.123.523.000,00	190.013.867.775,00	89,16	194.681.619.028,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.2	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	26.569.800.000,00	17.656.058.467,00	66,45	71.052.015.847,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	300,00	14.106.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	23.569.800.000,00	8.656.058.467,00	36,73	56.946.015.847,00
2	BELANJA	5.1.2	2.597.457.444.562,00	1.806.456.260.619,62	69,59	2.115.296.888.270,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.055.327.080.847,00	1.806.456.260.619,62	87,89	1.556.442.743.532,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.202.379.781.431,00	1.030.115.640.840,16	85,67	1.044.030.978.405,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	733.911.128.849,00	666.457.980.054,46	90,81	483.099.789.155,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	5.685.279.327,00	5.685.279.325,00	100,00	2.646.198.572,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	81.832.872.400,00	75.813.412.400,00	92,64	26.636.028.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	31.518.018.840,00	28.383.948.000,00	90,06	29.748.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	507.090.025.022,00	433.491.716.724,00	85,49	552.484.517.036,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	5.123.940.000,00	1.426.177.314,00	27,83	9.338.193.940,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	127.183.102.407,00	100.771.500.035,00	79,23	101.623.727.575,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	169.827.707.351,00	145.187.264.010,00	85,49	156.173.673.849,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	204.160.185.264,00	185.381.517.846,00	90,80	285.046.941.672,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	795.090.000,00	725.257.519,00	91,22	301.980.000,00



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran. 6 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2018

KOTA BOGOR		PEMERINTAH KOTA BOGOR					
		LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017					
NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)	
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.334.692.104.183,00	2.328.703.432.668,85	99,74	2.289.359.362.675,33	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	887.396.041.682,00	912.197.971.288,85	102,79	978.197.741.947,33	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	578.700.000.000,00	592.978.746.862,00	102,47	555.475.409.588,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	44.449.594.000,00	48.418.070.315,00	108,93	49.043.299.929,00	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	27.969.594.780,00	26.772.427.406,00	95,72	29.949.487.128,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	236.276.852.902,00	244.028.726.705,85	103,28	343.729.545.302,33	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.329.137.583.755,00	1.303.332.063.609,00	98,06	1.293.505.562.261,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.087.823.566.000,00	1.066.762.734.201,00	98,06	1.072.486.473.770,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	83.996.938.000,00	70.988.926.350,00	84,51	90.543.462.995,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	20.180.539.000,00	23.969.468.586,00	118,78	0,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00	100,00	791.929.143.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	191.716.946.000,00	179.875.196.265,00	93,82	190.013.867.775,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	118.158.478.746,00	113.173.397.771,00	95,78	17.656.058.467,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.126.747.546,00	87.142.218.371,00	94,59	9.000.000.000,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	26.031.731.200,00	26.031.179.400,00	100,00	8.656.058.467,00	
2	BELANJA	5.1.2	2.656.280.650.160,71	2.406.586.936.843,04	90,60	2.245.590.002.913,62	
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.118.814.639.370,71	1.945.851.266.176,04	91,84	1.806.456.260.619,62	
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.195.970.034.526,71	1.108.690.038.689,00	92,70	1.030.115.640.840,16	
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	749.808.967.659,00	672.795.038.324,21	89,73	666.457.980.054,46	
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	7.000.000.000,00	6.598.058.977,83	94,26	5.685.279.325,00	
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	122.276.492.285,00	118.993.313.285,00	97,31	75.813.412.400,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	43.759.144.900,00	38.774.816.900,00	88,61	28.383.948.000,00	
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	512.432.788.564,00	455.461.723.593,00	88,88	433.491.716.724,00	
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.111.980.000,00	9.314.649.200,00	92,11	1.426.177.314,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	111.358.670.675,00	101.665.269.154,00	91,30	100.771.500.035,00	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	71.633.896.252,00	66.483.846.768,00	92,81	145.187.264.010,00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	316.573.318.774,00	276.223.614.766,00	87,25	185.381.517.846,00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.754.922.863,00	1.774.343.705,00	64,41	725.257.519,00	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00	

Lampiran. 7 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2019

KOTA BOGOR		PEMERINTAH KOTA BOGOR					
		LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018					
NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)	
1	PENDAPATAN	5.1.1	972.407.288.978,00	1.015.884.216.919,86	104,45	912.197.971.288,85	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	644.546.554.586,00	689.543.006.040,00	106,98	592.978.746.862,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	96,10	48.418.070.315,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	100,56	26.772.427.406,00	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	100,08	244.028.726.705,85	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	1.577.997.671.710,00	1.455.644.350.874,00	92,25	1.303.332.063.609,00	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.066.762.734.201,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.066.762.734.201,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	73.713.874.000,00	53.495.346.384,00	72,57	70.988.926.350,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	856.297.349.000,00	838.948.449.000,00	97,97	791.929.143.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	204.362.379.000,00	189.891.532.535,00	92,92	179.875.196.265,00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00	
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2.4.1	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	113.173.397.771,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	87.142.218.371,00	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	26.031.179.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.639.970.560.668,00	2.559.857.207.793,86	96,97	2.328.703.432.668,85	
2	BELANJA	5.1.2	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	90,59	1.945.851.266.176,04	
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.303.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	90,67	1.108.690.038.689,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	789.887.964.541,00	711.181.422.815,19	90,03	672.795.038.324,21	
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	94,11	6.598.058.977,83	
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	85.099.234.000,00	79.149.334.000,00	93,01	118.993.313.285,00	
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	92,75	38.774.816.900,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.593,00	
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	23.510.000.000,00	18.044.020.000,00	76,72	9.314.649.200,00	
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	117.333.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	162.180.280.110,00	144.703.165.317,00	89,27	66.483.846.768,00	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	2.109.630.240,00	1.910.823.018,00	90,58	1.774.343.705,00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5					

Lampiran. 8 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2020



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

NOMOR : -

TANGGAL :

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741.531.123.201,00	872.017.242.152,12	130.486.118.951,12	117,60
411	Pendapatan Pajak Daerah	440.000.000.000,00	509.039.468.746,00	69.039.468.746,00	115,69
412	Pendapatan Retribusi Daerah	36.691.027.400,00	35.010.375.259,00	(1.680.652.141,00)	95,42
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.520.905.570,00	31.927.293.792,00	(1.593.611.778,00)	95,25
414	Lain-lain PAD yang Sah	231.319.190.231,00	296.040.104.355,12	64.720.914.124,12	127,98
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.453.476.644.604,00	1.415.498.666.396,00	(37.977.978.208,00)	97,39
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.086.295.148.560,00	1.083.171.964.899,00	(3.123.183.661,00)	99,71
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	74.511.394.093,00	86.344.563.026,00	11.833.168.933,00	115,88
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40.430.777.107,00	38.670.158.675,00	(1.760.618.432,00)	95,65
42103	Dana Alokasi Umum	769.048.963.000,00	762.556.115.000,00	(6.492.848.000,00)	99,16
42104	Dana Alokasi Khusus	202.304.014.360,00	195.601.128.198,00	(6.702.886.162,00)	96,69
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	0,00	100,00
42203	Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	0,00	100,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	(32.625.986.191,00)	87,24
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	(32.625.986.191,00)	87,24
424	Bantuan Keuangan	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	(2.228.808.356,00)	97,30
42401	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	(2.228.808.356,00)	97,30
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	(26.887.904.899,00)	83,99
431	Pendapatan Hibah	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	(26.887.904.899,00)	83,99
	JUMLAH PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	65.620.235.844,12	102,78
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	2.175.216.112.217,19	1.951.301.711.023,00	(223.914.401.194,19)	89,71

SIMRAL-BOGOR

Hal.

1

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
511	Belanja Pegawai	1.134.564.423.225,19	1.010.111.841.189,00	(124.452.582.036,19)	89,03
512	Belanja Barang	859.382.967.805,00	798.841.580.650,00	(60.541.387.155,00)	92,96
513	Bunga	8.010.000.000,00	5.427.749.091,00	(2.582.250.909,00)	67,76
515	Hibah	128.766.006.687,00	93.233.837.587,00	(35.532.169.100,00)	72,41
516	Bantuan Sosial	44.492.714.500,00	43.686.702.506,00	(806.011.994,00)	98,19
52	BELANJA MODAL	307.168.807.801,00	276.157.283.029,00	(31.011.524.772,00)	89,90
521	Belanja Tanah	7.400.700.000,00	2.772.077.406,00	(4.628.622.594,00)	37,46
522	Belanja Peralatan dan Mesin	143.259.350.921,00	129.790.481.108,00	(13.468.869.813,00)	90,60
523	Belanja Gedung dan Bangunan	35.666.473.387,00	30.694.955.339,00	(4.971.518.048,00)	86,06
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.689.262.659,00	109.784.631.171,00	(7.904.631.488,00)	93,28
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.797.647.834,00	1.789.184.630,00	(8.463.204,00)	99,53
526	Belanja Aset Lainnya	1.355.373.000,00	1.325.953.375,00	(29.419.625,00)	97,83
53	BELANJA TAK TERDUGA	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	(32.366.400.110,00)	79,60
531	Belanja Tak Terduga	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	(32.366.400.110,00)	79,60
	JUMLAH BELANJA	2.641.028.498.058,19	2.353.736.171.982,00	(287.292.326.076,19)	89,12
6	TRANSFER				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	0,00	100,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	0,00	100,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.642.163.029.058,19	2.354.870.702.982,00	(287.292.326.076,19)	89,13
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.203.761.253,19)	73.708.800.667,12	352.912.561.920,31	(26,40)
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN DAERAH	388.159.958.113,19	324.327.716.975,19	(63.832.241.138,00)	86,13
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	277.662.825.853,19	277.640.687.080,19	(22.021.138,00)	99,99
714	Pinjaman Dalam Negeri	75.000.000.000,00	32.159.096.032,00	(42.840.903.968,00)	42,88
715	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	(12.265.084,00)	99,78
716	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00	19.053.167.687,00	(10.946.832.313,00)	63,51
72	PENGELUARAN DAERAH	108.956.196.860,00	80.545.341.402,00	(28.410.855.458,00)	73,92
722	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.453.164.600,00	24.300.000.000,00	(4.153.164.600,00)	85,39
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	80.497.032.260,00	56.245.341.402,00	(24.251.690.858,00)	69,87

SIMRAL-BOGOR

Hal.

2

Lampiran. 9 Hasil Olah Data SPSS

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan Asli Daerah ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistiks					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
dimension0	.393 ^a	.155	-.057	153.015	.155	.732	1	4	.440	2.049

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17144.269	1	17144.269	.732	.440 ^a

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistiks					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1 dimension0	.393 ^a	.155	-.057	153.015	.155	.732	1	4	.440	2.049

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Residual	93654.564	4	23413.641		
Total	110798.833	5			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Coefficients^a

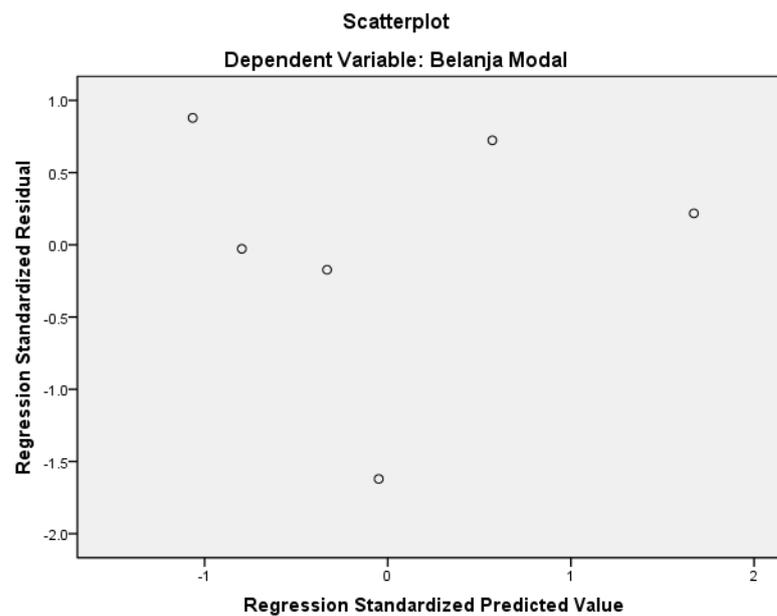
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	914.997	422.039			2.168	.096
	Pendapatan Asli Daerah	-.413	.483	-.393		-.856	.440

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Pendapatan Asli Daerah
1	1	1.989	1.000	.01	.01
	2	.011	13.438	.99	.99

a. Dependent Variable: Belanja Modal



Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Sig.	Statistik	df	Sig.
Unstandardized Residual	.257	6	.200*	.884	6	.287

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran. 10 Hasil Uji SPSS Lanjutan

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak , Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Khusus ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Model Summary

Model		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0	1	1.000 ^a	1.000	.	.

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak , Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Khusus

Lampiran. 11 Hasil Uji PAD Terhadap Belanja Operasi

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	64.18272765
Most Extreme Differences	Absolute	.175
	Positive	.142
	Negative	-.175
Kolmogorov-Smirnov Z		.428
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

a. Test distribution is Normal.

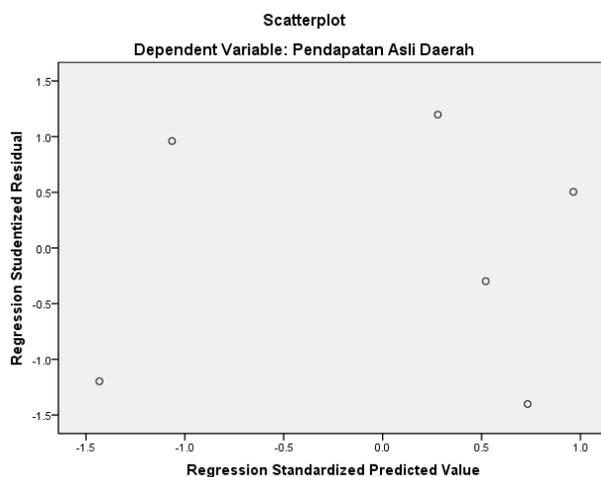
b. Calculated from data.

Menurut hasil uji Kolmogorof-Smirnov pada penelitian ini menghasilkan nilai sebesar $0,429 > 0,05$. Artinya residual data memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearits

Pada penelitian ini tidak dapat dilakukan Uji Multikolinearitas karena hanya terdiri dari 1 variabel independen saja yaitu Pendapatan Asli Daerah. Jadi, tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas



Dari Scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu x dan sumbu y, serta tidak membentuk pola atau tidak beraturan. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau bersifat Homokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.892 ^a	.795	.744	71.758	.795	15.529	1	4	.017	1.816

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan pada table di atas adalah sebesar 1,816 yang mana angka tersebut berada di antara 1,5-2,5. Artinya pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-83.348	242.436		-.344	.748
Belanja Operasi	.479	.121	.892	3.941	.017

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel *Coefficients*, dihasilkan nilai Signifikan sebesar $0,017 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Operasi.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.892 ^a	.795	.744	71.758	.795	15.529	1	4	.017	1.816

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,795 atau sebesar 79,5%. Artinya kemampuan Pendapatan Asli Daerah menjelaskan Belanja Operasi sebesar 79,5% dan sisanya sebesar 20,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-83.348	242.436		-.344	.748
Belanja Operasi	.479	.121	.892	3.941	.017

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil yang ditunjukkan di atas menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -83,348 + 0,479X$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,479 dan bernilai positif. Artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen Belanja Operasi akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,479.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Operasi ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.892 ^a	.795	.744	71.758	.795	15.529	1	4	.017	1.816

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

